

## Jenderal Andika Marah Besar saat Lihat Anggotanya Main Handphone Saat Rapat

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Permana marah besar dalam sebuah rapat. Ia marah kepada Kepala Staf Korem (Kasrem) 174/ATW Merauke Kolonel Arh Hamim Tohari yang dianggap tidak memperhatikan instruksinya, tapi justru bermain handphone (HP).

Kecelakaan itu ketika Jenderal Andika memimpin rapat yang digelar online. Andika marah karena Hamim dianggapnya tidak memperhatikan arahan yang disampaikan ketika rapat.

"Mas Hamim lihat saya, enggak usah lihat handphone. Saya ngomong enggak sering. Handphone geser, Mas Hamim handphone geser," ucap Andika dalam

rekaman video rapat tersebut dikutip, Jumat (3/12).

Selanjutnya, Hamim segera merespons perintah Andika. "Siap sudah," ucap Hamim.

"Ke samping kiri, jauh," kata Andika lagi.

Selanjutnya, Jenderal Andika meminta kepada Hamim untuk mengulangi yang disampaikan sebelumnya mengenai substansi rapat tersebut. Saat itu Hamim hanya menyatakan siap dan terdiam.

Andika kemudian mengingatkan atasan Hamim di Kodam XVII Cenderawasih yang saat itu juga ikut rapat bersama secara daring. "Mas Bangun lihat. Itulah anak buahnya Mas Bangun," ungkap Jenderal Andika. ● han

## BPPA Umumkan 18 Calon Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025

JAKARTA (IM) - Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers mengumumkan 18 nama calon anggota Dewan Pers periode 2022-2025. Ke-18 nama calon ditetapkan dalam rapat BPPA pada Kamis (2/12) di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Ke-18 calon tersebut terdiri dari 6 calon dari unsur tokoh masyarakat, 6 calon dari unsur wartawan, dan 6 calon dari pimpinan perusahaan pers. Berikut nama-nama calon Anggota Dewan Pers tersebut (berdasar urut abjad):

Enam Calon Anggota Dewan Pers Unsur Tokoh Masyarakat: Asep Setiawan, Atmaji Sapto Anggoro, Azyumardi Azra, Irwa R Zarkasi, Ninik Rahayu, Rajab Ritonga.

Kemudian enam Calon Anggota Dewan Pers dari Unsur Wartawan: Abdul Manan, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, Paulus Tri Agung Kristanto, Wahyu Triyogo, dan Yadi Heriyadi Hendriana

Sedangkan enam Calon Dewan Pers Unsur Pimpinan Perusahaan Pers yakni: Asmono Wikan, M Agung

Dharmajaya, M Rafiq, Metta Dharma Saputra, Muhammad Nasir, dan Totok Suryanto.

Mereka dipilih dari 28 nama bakal calon yang masuk ke BPPA hingga penutupan pendaftaran pada Jumat (26/12). BPPA meminta masyarakat untuk memberikan masukan atas nama nama calon anggota Dewan Pers tersebut.

Masukan ditunggu hingga Kamis (16/12), yang dikirim ke alamat surat elektronik sekretariat@dwepers.or.id atau ke alamat Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat (tel. 021-3504877-75).

Masukan akan ditindaklanjuti apabila menyertakan nama, identitas, dan nomor telepon sebagai bagian verifikasi keabsahan masukan. BPPA menjamin kerahasiaan identitas pemberi masukan. Adapun masukan dari masyarakat ini akan menjadi pertimbangan BPPA dalam menetapkan sembilan anggota Dewan Pers terpilih yang diumumkan pada Januari 2022. ● han

## Azis Syamsuddin akan Jalani Sidang Perdana Senin Depan

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, (6/12).

Azis merupakan terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah yang ditangani KPK.

"Benar, sesuai penetapan majelis hakim yang kami terima, diadwalkan sidang perdana terdakwa M Azis Syamsuddin di PN Tipikor Jakarta Pusat," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12).

"Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan tim jaksa KPK," katanya menjelaskan.

Adapun berdasarkan dakwaan yang disusun tim KPK, Azis didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Azis berawal ketika politisi Partai Golkar itu menghubungi penyidik KPK Stepanus Robin

Pattuju pada Agustus 2020.

Tujuannya, kata Firli, untuk meminta tolong mengurus kasus yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya yaitu Aliza Gunado. Untuk diketahui, Robin kini sudah diberhentikan KPK setelah berstatus tersangka terkait dugaan korupsi penanganan perkara di KPK.

Selanjutnya, Robin menggubungi Maskur Husain seorang pengacara untuk mengurus dan mengawal kasus tersebut. Setelah itu, Maskur Husain menyampaikan kepada Azis dan Aliza untuk masing-masing menyiapkan Rp 2 miliar.

Permintaan sejumlah uang tersebut yang kemudian disetujui Azis. Uang lantas ditransfer Azis ke rekening Maskur secara bertahap.

Firli menuturkan, pada Agustus 2020 Robin juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang, kali ini tunai.

Uang diberikan secara bertahap yaitu sebanyak 100.000 dollar AS atau Rp 1,42 miliar, 17.600 dollar Singapura (Rp 185 juta) dan 140.500 Dollar Singapura (Rp 1,48 miliar). ● han

# 2 Poihukam

FOTO/ANT



## PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL DI JAWA BARAT

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) secara simbolis memberikan hadiah kepada atlet peraih medali Peparnas XV pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/12). Pemrov Jawa Barat memberikan hadiah kepada sejumlah atlet Peparnas Papua yang memperoleh medali sebagai bentuk apresiasi kepada atlet disabilitas.

# Anggota DPR dari Nasdem Minta Ajudan TNI, KASAD Jenderal Dudung: Tidak Akan Dipenuhi

Hillary meminta ajudan dari TNI karena ingin menangani sebuah kasus di Sulawesi Utara. Menurutnya kasus tersebut sangat berbahaya, yang bisa mengancam keselamatannya.

JAKARTA (IM) - Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta ajudan dari TNI untuk pengamanan kegiatan kesehariannya dan juga keluarganya. Permohonan bantuan itu ia sampaikan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Namun Jenderal Dudung memastikan bahwa permintaan Hillary itu tidak akan dipenuhi. "Soal permintaan ajudan) tidak akan dipenuhi," tegas Dudung saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/12).

Sebagaimana diketahui, Hillary yang berasal dari Fraksi Partai NasDem ini men-

gatakan, dirinya punya dasar mengajukan surat permohonan tersebut. Yaitu, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tenaga Profesi Prajurit TNI yang Bertugas di Luar Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI.

Permintaan itu pun disampaikan lewat surat ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KASAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai

dengan Permen Nomor 85 Tahun 2014," kata Hillary Kamis (2/12).

Dikatakan Hillary, setelah dirinya mengetahui permen itu, dia pun akhirnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan ajudan seorang TNI. Apalagi, dia sudah lama mempertimbangkan permintaan bantuan pengamanan.

Hillary ber alasan memilih TNI karena dinilai selalu siap secara fisik dan mental untuk keadaan darurat.

Anggota DPR ini juga mengungkapkan, dirinya merasa tidak enak jika masih harus meminta ajudan dari Polri. Dia sudah terlalu sering merepotkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait banyaknya kasus masyarakat kecil di Sulut yang dia kawal selama ini.

Akibat permintaan ajudan tersebut, Hillary menjadi perbincangan karena meminta ajudan dan bantuan pengamanan dari TNI. Menanggapi ramai pemberitaan dirinya, Hill-

ary pun menjelaskan alasan permintaan ajudan TNI itu. Ia meminta maaf jika dianggap tidak etis karena minta ajudan dari TNI.

"Mohon maaf kalau niat saya ini dianggap tidak etis. Proses belajar," kata Hillary dalam akun Instagramnya, dikutip pada Jumat (3/12).

Hillary lalu menjelaskan latar belakang ia meminta pengamanan. Ia ingin menangani sebuah kasus di Sulawesi Utara. Menurutnya kasus tersebut sangat berbahaya. Hanya saja Hillary tak menjelaskan rinci bahaya yang dimaksudnya.

Salah satu contoh begitu berbahayanya kasus ini adalah kerabat dekatnya yang merupakan pejabat pernah mengadvokasi kasus ini. Tapi, ia malah menyalah dunia secara misterius di pesawat. Oleh sebab itulah, Hillary berinisiatif meminta pengamanan dari TNI agar merasa lebih aman dalam mengikuti kasus ini.

"Entah ada kaitannya atau tidak, saya tidak dapat restu keluarga. Karena masyarakat terus berdatangan, meminta tolong, saya berjanji pada ayah saya mau minta satu orang untuk pengamanan saya, agar ayah saya lebih tenang," urai Hillary.

Hillary mengaku sudah membentuk tim dan melakukan persiapan untuk mulai mengadvokasi dan membantu masyarakat terkait kasus ini. Ia bakal fokus menangani kasus ini tahun depan, setelah mendapatkan bantuan penga-

manan TNI, institusi yang tidak terkait dengan kasus itu.

Ia berjanji bakal mencari cara agar bisa menangani kasus ini. Jika tidak mendapat pengamanan, ia bakal mencari perlindungan lain.

### Ditegur Nasdem

Di kesempatan terpisah, Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali mengaku telah menegur Hillary Lasut atas polemik permintaan ajudan tersebut. Menurut Ali, tak ada tindakan perorangan anggota DPR meminta ajudan dari TNI untuk kepentingan pribadi.

"Pasti ditegur. Seharusnya semua itu harus sepengetahuan fraksi, apalagi menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi," kata Ali saat dimintai tanggapan, Jumat (3/12).

Bagi Ali, permintaan tersebut tak etis, apalagi ajudan yang dimaksud Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau Komando Cadangan Strategis (Kostrad).

"Kalau risiko seorang politikus harus tahu sebelumnya. Kemudian tidak ada juga eskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan, apalagi Kopassus dan Kostrad. Seorang pasukan khusus tidak patut untuk diberi pengamanan ke anggota DPR Fraksi NasDem," tegas Waketum DPP NasDem ini. Hillary, masih melalui akun Instagramnya mengaku akan taat kepada arahan Fraksi jika menilai tindakannya tak etis. ● han



**PEMERIKSAAN LANJUTAN EDI UMARI**  
Tersangka Kabid SDA/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin Edi Umari (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/12). KPK memeriksa Edi Umari terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

## KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Proyek di Kota Banjar

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa tiga saksi terkait kasus korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017.

Ketiganya yakni, Elon Dahlan (Kabid perbendaharaan Kota Banjar), Ading Amir Ridwan (Kasubbid belanja langsung kota Banjar), dan staf belanja langsung kota Banjar Bernama Ina Malvina.

"Penyidikan perkara dugaan TPK terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Hari ini (3/12) bertempat di gedung Merah Putih, Tim Penyidik

mengagendakan pemanggilan saksi-saksi," ujar PltJuru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/12).

Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun, KPK belum menyampaikan informasi detail terkait perkara dan juga pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Saat ini, penyidik masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang diantaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota

Banjar. Salah satu lokasi yang telah dicegiledah yakni pendopo Wali Kota Banjar.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali. ● me

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini kami Direksi PT AMINCO JAYA PRATAMA, berkedudukan di Kota Bekasi ("Perseroan") mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah berencana untuk mengalihkan hak kepemilikan saham dalam Perseroan yang akan menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Maka terhitung mulai hari ini, kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan rencana pengalihan saham-saham Perseroan tersebut agar dapat mengajukan keberatan secara tertulis beserta bukti-bukti yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan yang beralamat di:

PT AMINCO JAYA PRATAMA  
M. Gold Tower Lt. 16 E  
Jl. KH. Noer Ali, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan,  
Bekasi, 4 Desember 2021  
Direksi  
PT AMINCO JAYA PRATAMA

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRUJKA SEGIHAN UTAMA (dalam Likuidasi), berkedudukan di Samarinda, tanggal 30 November 2021, nomor 43, yang dibuat oleh Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca Akhir Likuidasi Perseroan;  
2. Menyetujui menerima pertanggungjawaban Likuidator Perseroan;  
3. Menyetujui memberhentikan dan membubarkan Likuidator Perseroan.  
4. Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium kepada Likuidator Perseroan.

### PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan RUPSIS PT. INDI DAN KAY berkedudukan di Jakarta Timur, Akta No. 6 tertanggal 16 November 2021, diputuskan membubarkan Perseroan serta menunjuk Reginald Roripandey, Sarjana Ekonomi, selaku Likuidator Perseroan.

Selama keberatan dan sanggahan atas pembubaran Perseroan dapat diajukan kepada:  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI,  
Jl. HR. Rasuna SAID, Kav 6-7,  
Jakarta Selatan.

Dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini,  
Jakarta, 4 Desember 2021  
DIREKTUR UTAMA  
Reginald Roripandey, SE

## Acara Jalan Sehat Langgar Prokes, Dua Warga Lampung Ditahan Polisi

JAKARTA (IM) - Sebanyak dua warga Bandar Lampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus melanggar protokol kesehatan (Prokes). Pelanggaran Prokes itu pada acara jalan sehat dan menciptakan kerumunan pada saat Bandar Lampung melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Direskrimum Polda Lampung, AKBP Reynold Elisa Hutagalung mengatakan, peristiwa kerumunan terjadi pada 10 Agustus 2021. Di mana, lanjut dia, saat itu wilayah Bandar Lampung masih berlangsung PPKM Level 4 dan acara tanpa penerapan prokes dalam pencegahan Covid-19.

"Penanganan perkara tindak pidana penghasutan baik lisan maupun tertulis dan mengakibatkan terjadinya jalan sehat yang menimbulkan kerumunan oleh warga khilafatul muslimin," kata Reynold, kepada wartawan, Jumat (3/12).

Kegiatan jalan sehat tersebut diikuti sekitar 150 orang dengan menggunakan seragam warga khilafatul muslimin dengan rute Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan jalan sehat tersebut, tidak ada mengajukan

permohonan izin baik lisan maupun tertulis kepada Satgas Covid 19 Kota Bandar Lampung maupun Satgas Covid-19 Propinsi Lampung.

"Sehingga, menimbulkan kerumunan tanpa penerapan protokol kesehatan pada saat PPKM Level 4," ujarnya.

Setelah melakukan gelar perkara penetapan tersangka pada 4 oktober 2021, C aias AB ditetapkan menjadi tersangka dengan sangkahan Pasal 160 KUHP dan atau pasal 216 KUHP dan atau pasal 14 ayat (1) Undang-undang no 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 93 JO pasal 9 ayat (1) UU nomor 06 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Kemudian, AQB ditetapkan menjadi tersangka dengan sangkahan pasal 160 KUHP subsider 160 KUHP JO 55 KUHP JO pasal 56 KUHP dan atau pasal 14 ayat (1) UU nomor 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 93 jo pasal 9 ayat (1) UU nomor 06 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

"Dilakukan penahanan, dengan alasan untuk mempercepat penyidikan dan melengkapi berkas perkara serta agar tersangka tidak mengulangi perbuatan nya lagi," katanya.

● mar

### PENGUMUMAN

RENCANA PENGALIHAN SELURUH SAHAM DALAM PERSEROAN PT. GEOSYS INFRADATA

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2), (4), (5) dan (8) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT. GEOSYS INFRADATA ("Perseroan") dengan ini mengumumkan:

"Rencana pemegang saham perseroan akan mengalihkan 100% sahamnya, jika sampai 30 hari setelah pengumuman ini, jika ada pihak yang berkeberatan atas pengalihan saham ini, dapat menghubungi pengurus perseroan.  
Jakarta, 4 Desember 2021  
tit  
Direksi Perseroan  
PT. GEOSYS INFRADATA



**TEMPAT PENGOLAHAN TAMBANG EMAS PERTAMA DI INDONESIA TERBENGKALAI**  
Kondisi salah satu mesin derek pengangkut emas yang terbengkalai di Cikota, Lebak, Banten, Kamis (2/12). Cagar budaya tempat produksi pengolahan emas pertama di Indonesia yang dibangun pada masa Kolonial Belanda tersebut kondisinya terbengkalai sehingga sebagian bangunan rapuh dan rusak.